

DAFTAR PUSTAKA

- Unggul, Universitas Esa, '*Demi Kepentingan Umum Di Indonesia*', *Sign Jurnal Hukum*, 1.2 (2020), pp. 71–86
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan, 2009.
- Permadi, Iwan. *Unifikasi dan Pluralisme Hukum Agraria*. Malang: Gunung Samudera, 2017
- Umar Said Sugiharto (et.al), *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Malang : Setara Press, Cetakan II, 2015
- Sutedi, Andrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2020
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, 'Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.2 (2020), p. 219, doi:10.21111/jicl.v3i2.5389
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)', *Journal Law and*

Government, 2.1 (2024), pp. 46–58 <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>

Zahrah Farhataeni Rohman and Heru Sugiyono, “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH NEGARA KEPADA PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM Juridical Review Of Granting Ownership Rights To State Land To Individuals Or Legal Entities,” *National Conference on Law*, 2020, 583, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1510/968>

D C A Ningtyas, “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 27763, no. 1 (2023): 28–34, <https://paperity.org/search/?q=authors%3A%22Dina+Catur+Ayu+Ningtyas%22>

Wayan Artana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PT. Bali Pecatu Graha (Studi Kasus Perkara Nomor: 65k/Pdt/2012/Ma),” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 664–70. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4038.664-670>

Edi Rohaedi, dkk. 2019. Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Pakuan Law Review*. Volume 5, Nomor 1. Hlm 214. <https://doi.org/10.33751/palar.v5i2.1192>

Rahayu Subekti. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia*. Vol. 5 No. 2. 382-383. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>

Ade Surya, Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo, 21 Februari 2025, <https://pembangunansukoharjo.blogspot.com/2018/12/rencanapembangunan-jalan-lingkar-timur.html?m=1>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

LAMPIRAN



1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Wahyu Dwi Hari Prasetyo, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Sukoharjo pada Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo



1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Totok Agung Prabowo, selaku Kepala Dusun 1 di Desa Manisharjo



1.3 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Warsino Adi, selaku Kasi Pemerintahan



1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sukiman, warga masyarakat yang terkena proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT)



1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Maya, warga masyarakat yang terkena proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT)



1.6 Lokasi Jalan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT)

